

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA BAKUNG

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi
Publik



Oleh :

Rihhadatul Aisy 2216041132

Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

2023

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Yusrival (2022).

Penelitian Yusrival (2022), berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku hubungan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perilaku hubungan organisasi di TPS Bukit Asri telah terlaksana dengan melihat komitmen dan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. Sehingga indikator pertama yaitu Perilaku hubungan antar organisasi telah dijalankan oleh pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bukit Asri dalam merencanakan, membangun, mengelola, serta menjalankan TPS Bukit Asri ini agar dapat mengurangi volume sampah sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

2. Penelitian Arief Rakhman Hakim (2021)

Penelitian Arief Rakhman Hakim (2021), berjudul *“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor - faktor pendukung maupun penghambat kebijakan Pemerintah berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan Dan Kondisi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengolahan Sampah perlu melibatkan stekholder terkait, karena dalam menyadarkan masyarakat terkait penanganan sampah membutuhkan metode yang pas , sehingga mampu di tangani dengan serius Teknologi ini digunakan untuk mengurangi kuantitas dan kompleksitas sampah secara regional. Rantai transportasi yang panjang dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan akan terpotong dengan model ini (APBD). Selanjutnya,

masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan, sehingga menghasilkan proses dan hasil yang secara signifikan lebih unggul dari cara saat ini.

3. Penelitian Teguh Imam Fitroni (2018).

Penelitian Teguh Imam Fitroni (2018), yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lamongan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pada fokus Sumberdaya, terdapat masalah minimnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah. Minimnya fasilitas ini menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Lamongan. Dalam fokus Struktur Birokrasi, Kapasitas dari Dinas PRKP adalah urusan teknis dalam tatakelola sampah, dan pengadaan berbagai sarana dan prasarana belum memadai. Disitulah diperlukan dinas lain yang menangani permasalahan diluar kapasitas dinas teknis, yakni untuk memberikan pendidikan masyarakat mengenai sampah. Dan tugas ini dalam kapasitas DLH, untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Faktor pendukung yang peneliti temui di lapangan ada dua, yakni adanya komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan untuk menangani permasalahan sampah dan adanya jejaring kerjasama antara pelaksana kebijakan dalam Program LGC. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah minimnya fasilitas publik untuk penanganan sampah. Fasilitas tersebut terdiri dari ketersediaan TPA dan Tempat Sampah yang sudah terpilah jenis sampahnya. Kemudian adalah tidak adanya keterlibatan yang masif dari aktifis lingkungan dan LSM.

B. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Pengaruh

a). Pengertian Pengaruh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:1045), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala

sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya (Yosin, 2012:1).

Menurut surakhmad (2012: 1), Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya.

2. Tinjauan Umum Implementasi

a). Pengertian Implementasi

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Sopiarno (2015:8) istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, (2008:65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

b). Pengertian Implementasi Kebijakan

implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Wahab dalam (Mokodompis et al., 2019) merumuskan proses implmentasi kebijakan sebagai berikut: Suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottomup, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat bersifat : distributive, regulatory, selfregulatory, redistributive (Anderson, 1978 : 127; Ripley, 1987 : 71).

Menurut Soren C. Winter ada 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yakni :

1) Perilaku hubungan antar organisasi.

Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagianbagian organisasi itu. Tingkat implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional.

Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku implementor tingkat bawah. Hal ini dimaksudkan

sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya “menyimpang” dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, perilaku imlementor tingkat bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementai kebijakan public, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya (Parawangi,2011).

3). Perilaku Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif (Winter:2003). Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

3. Tinjauan Umum Kebijakan

a). Pengertian Kebijakan

Secara bahasa atau etimologi, kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:49), diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Adapun Menurut Lasswell (dalam Sopianito,2015:18), kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur.

Carl J Federick (dalam Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan dan keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

b). Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji kebijakan. Menurut Dunn (dalam Winarno, 2012:36), tahap-tahap kebijakan adalah:

- **Penyusunan Agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- **Formulasi Kebijakan**

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives atau policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

- **Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

- **Implementasi Kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi pemerintahan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

- Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

4. Tinjauan Umum Sampah

a). Pengertian Sampah

Berikut berbagai definisi dan batasan mengenai sampah yang banyak tertulis dalam buku yang bersumber dari beberapa organisasi dan ahli persampahan serta lingkungan, antara lain (Trisna, 2014:4) :

- Menurut WHO expert commite, Jhon Pickford- Solid wastes are useless, unwanted or discarded material arises from man's activities and not free- following.
- Menurut George Tehobanoglous, solid wastes are all that are normally solid and and that are discarded as useless and unwanted.
- Menurut Tandjung, sampah adalah sesuatu yang tak berguna lagi, di buang oleh pemiliknya atau pemakai semula.
- Mandelan, sampah adalah limbah padat yang di buat dari aktivitas Manusia.
- Menurut istilah untuk manajemen, Ecolink, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
- Menurut Radyastuti, sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.
- Berdasarkan SK SNI 19-2454, sampah adalah limbah padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang sudah di anggap tidak berguna lagi dan terus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
- Menurut Anwar, sampah adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai dan tidak di inginkan lagi pada saat dimana pemiliknya membuangnya yang dapat berasal dari hasil aktivitas baik manusia

maupun makhluk hidup lainnya namun dapat bernilai pada saat pihak kedua memanfaatkannya.

- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk padat yang tidak diinginkan lagi dan dianggap tidak berguna pada waktu tertentu

b). Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaaur ulangan sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah. Sedang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- Pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.
- Pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara / tempat pengolahan sampah terpadu.
- Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah.

sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan yang sebelumnya menuju ke media lingkungan secara aman.

Untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini, pengelolaan sampah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah 3R

(reduce, reuse, recycle) yang berarti pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan. Dalam Vesilind (2012) menjelaskan mengenai

metode pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. Reduction (pengurangan)

Pengurangan sampah dapat dicapai dengan tiga cara :

Mengurangi jumlah bahan yang digunakan dari tiap produk tanpa mengorbankan fungsi produk

Meningkatkan masa hidup suatu produk

Mengurangi / menghilangkan kebutuhan penggunaan suatu produk

2. Reuse (penggunaan kembali)

Yaitu menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya (penggunaan barang bekas)

3. Recycling (pendaurulangan)

Proses pendaurulangan membutuhkan pemisahan dari materi yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Materi sampah yang dapat didaurulang berupa sampah padat seperti kertas, logam, plastik, kaca, dan sampah dari lahan.

4. Recovery (pemulihan)

Proses ini rata-rata digunakan untuk sampah yang terbuat tidak dari 1 material. Sebagai contoh : kaleng minuman, terbuat dari baja (steel), seng, dan kertas pembungkus pada bagian luar. Proses recovery ini melalui suatu mesin yang dapat memulihkan bagian tertentu dari produk sehingga dapat digunakan kembali.

5. Disposal of Solid Waste in Landfills (pembuangan sampah padat di lahan)

Sampah padat disini menjadi bagian dari bahan urugan tanah.

6. Energy Conversion (pengubahan energi)

Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh energi dengan penguraian dan pembentukan bahan bakar melalui pembakaran sampah sehingga didapat tekanan / panas.

C. Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pengelolaan sampah di Indonesia, ditekankan bahwa sampah telah menimbulkan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Disadari bahwa sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak dapat dihindari. Kecenderungannya bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, pertumbuhan jumlah penduduk maupun dinamika kehidupan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam upaya mengurangi sampah dari tingkat sumber sampah sampai pengelolaan sampah itu sendiri.

Secara normatif, banyaknya sampah yang dihasilkan harus diolah dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan efek negatif seperti mencemari lingkungan yang mana dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan banjir, serta penyumbatan sistem drainase dan sebagainya. Namun ternyata, kesadaran untuk mengolah sampah dengan baik di dalam masyarakat masih minim. Hal ini dapat dilihat dari anggapan masyarakat mengenai sampah itu sendiri yang dianggap sebagai limbah yang tak memberikan manfaat maupun anggapan bahwa urusan sampah adalah urusan pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 18 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah yang berisi:

- a) Target pengurangan sampah
- b) Target penyediaan sarana-prasarana pengurangan dan penanganan sampah

mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA

- c) Pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat
- d) Target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah, dan
- e) Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pada aspek isi kebijakan, variabel yang akan dievaluasi adalah:

- (1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- (2) Derajat perubahan yang diinginkan,
- (3) Kedudukan pembuat kebijakan,
- (4) Siapa pelaksana program, dan
- (5) Sumber daya yang digunakan.

Sementara dalam konteks implementasinya, faktor yang akan dievaluasi adalah:

- (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,
- (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, serta
- (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Oleh karna itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah di TPA Bakung atas Perda Kota Bandar Lampung No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah.

D. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah di TPA Bakung.
2. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat sekitar TPA Bakung maka hasil pengelolaan yang yang dihasilkan lebih unggul dari cara saat ini.

Daftar Pustaka

- Yacadewa, A., & Musa'ad, M. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Distrik Sentani kabupaten jayapura. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*, 4(3), 124–142. <https://doi.org/10.31957/jkp.v4i3.2417>
- Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis tempat pengelolaan sampah terpadu 3r di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195–203. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>
- Riduan, A. (2021). *Penanganan Dan Pengelolaan sampah: (Studi Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Bintang Pustaka Madani.